

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perjanjian normalisasi hubungan antara Republik Rakyat Cina (Cina) dan Amerika Serikat (AS), yang ditandatangani tanggal 1 Januari 1979, dikemukakan antara lain bahwa Cina dan AS sepakat untuk saling mengakui satu sama lain dan membina hubungan diplomatik. Cina dan AS sepakat untuk mengurangi bahaya konflik internasional. AS mengakui bahwa Cina adalah wakil pemerintahan yang sah dan Taiwan adalah bagiannya. Kedua negara meyakini bahwa normalisasi hubungan Cina-AS tidak hanya kepentingan kedua belah pihak, melainkan juga berkontribusi terhadap perdamaian dunia.¹ Dalam dekade pertama sejak dibuka hubungan diplomatik, hubungan kedua negara berjalan dengan baik dan stabil, serta program kerjasama dan pertukaran bilateral di berbagai bidang meningkat, meskipun tidak jarang dihadapkan kepada kondisi yang sulit dalam masalah Taiwan maupun isu-isu lain.²

Sepanjang sejarah, hubungan antara Cina-AS ditandai oleh naik turunnya hubungan tersebut, yang terkadang dalam kondisi baik, namun tidak jarang juga dalam kondisi buruk. Kondisi tersebut seperti pepatah Cina yang mengatakan, “Pohon lebih senang diam dengan tenang, tetapi angin pasti menolak untuk disuruh diam”. Pepatah tersebut sesuai untuk menggambarkan hubungan Cina-AS yang selalu naik turun.³ Dalam realitanya, kerjasama sering terjadi dalam hubungan kedua negara, namun tidak jarang pula terjadi ketegangan, antara lain seperti tercermin dari pernyataan Presiden George W. Bush di awal masa jabatannya sebelum tragedi *World Trade Center* (WTC) tahun 2001, yang mengubah pola pendekatan hubungan Cina-AS dari *strategic partnership approach* menjadi *strategic competition approach* yang bersifat konfrontatif. Ketegangan ini sedikit mereda sejak tragedi WTC, ketika AS merubah prioritas politik internasionalnya untuk memerangi terorisme global.

¹ Ivan Taniputera, *History of China*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2008, h. 594-595.

² Aa Kustia Sukarnaprawira, *China: Peluang atau Ancaman*, Jakarta: Restu Agung, 2009, h. 198.

³ *Ibid*, h. 196, 200, dan 201.

Cina bersikap *welcome* terhadap perubahan tersebut dengan pertimbangan bahwa perubahan tersebut secara politik menguntungkan Cina karena mengalihkan perhatian AS dari kegemaran menyorot isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Cina, seperti yang terjadi pada era Bill Clinton. Perang melawan terorisme global yang menguras energi memaksa AS bersikap lebih akomodatif terhadap Cina.⁴ Meskipun dalam hubungan Cina-AS sering mengalami ketegangan dalam bidang militer, tidak demikian halnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang pada dasarnya menuntut semangat kerjasama, seperti kerjasama perdagangan bebas pada tataran global dalam rangka *World Trade Organization* (WTO). Demikian juga halnya komitmen kerjasama Cina-AS juga dituntut dalam rangka kerjasama ekonomi regional, seperti *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC). Dalam rangka APEC, AS dan Cina, sebagai dua negara anggota di antara 21 anggota APEC, dituntut untuk melakukan kerjasama penuh sesuai 8 prinsip dasar APEC, yakni perdagangan dan investasi bebas, kerjasama internasional, solidaritas regional, saling menguntungkan, saling menghormati dan egalitarian, pragmatisme, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus bersama dan implementasi dengan mendasarkan pada fleksibilitas, serta regional terbuka.⁵

Semenjak berdirinya Cina pada tahun 1949 hingga 1978, sistem politik berdasarkan ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme ternyata gagal membawa kemajuan bagi Cina. Oleh karena kegagalan tersebut, maka ketika Deng Xiaoping pada tahun 1978 muncul sebagai pemimpin, Cina menerapkan kebijakan membuka diri secara politik dan ekonomi (*gaige kaifang*),⁶ yang justru telah dimulai sebelum globalisasi populer di seluruh dunia, yakni dengan telah ikut berpartisipasi Cina dalam perekonomian dunia.⁷ Kebijakan keterbukaan tersebut dilakukan secara evolusioner (*gradual*), melalui liberalisasi kurs mata uang asing, perdagangan internasional, dan penanaman modal asing.⁸

⁴ I. Wibowo dan Syamsul Hadi, *Merangkul Cina*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, h. 284.

⁵ Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 10.

⁶ Bob Widayartono, *Bangkitnya Naga Besar Asia: Peta Politik, Ekonomi, dan Sosial China Menuju China Baru*, Yogyakarta: Andi, 2004, h. 131 dan 12.

⁷ Yong Deng & Thomas G. Moore, *China Views Globalization: Toward a New Great Power Politic?*, *The Washington Quarterly*, 2004, http://yaleglobal.yale.edu/about/pdfs/China_views.pdf, h. 118.

⁸ Bob Widayartono, *op.cit.*, h. 131 dan 12.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Cina merupakan yang tercepat di dunia. Dari tahun 1979 dan setelah Cina menjadi anggota WTO pada tahun 2001 sampai 2007, *gross domestic product* (GDP) Cina tumbuh dengan rata-rata di atas 9 persen pertahun dengan GDP nyata pada tahun 2007 sebesar 11,4 persen. Meskipun begitu, Cina tetap menghadapi banyak tantangan akibat meningkatnya kejahatan korupsi, ketergantungan pada ekspor dan pertumbuhan investasi tetap, melebarnya disparitas pendapatan, serta meningkatnya inflasi. Atas hal tersebut, pemerintah Cina telah menyatakan akan berusaha menciptakan masyarakat harmonis (*harmonious society*) dengan harapan akan menambah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan isu-isu sosial. Pertumbuhan ekonomi Cina didominasi oleh dua hal, yaitu perdagangan dan investasi. Dari tahun 2004 sampai 2007, nilai total perdagangan barang-barang Cina meningkat hampir dua kali lipat. Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya nilai total ekspor Cina sebesar 1.218 miliar dolar melebihi nilai total ekspor Amerika Serikat sebesar 1.162 miliar dolar. Lebih dari setengah perdagangan Cina dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang berada di Cina.

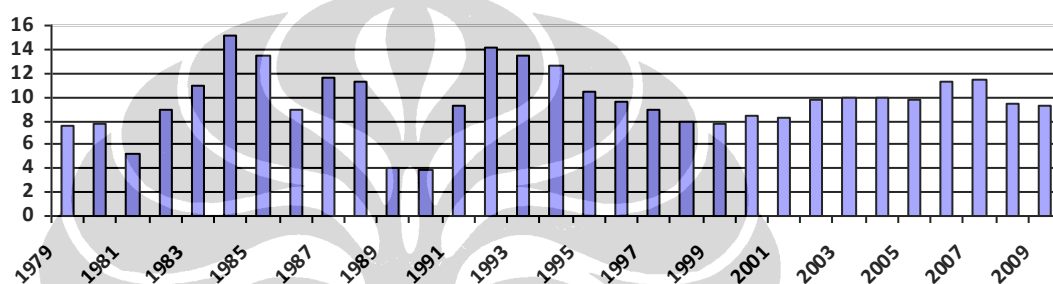
Kombinasi dari besarnya surplus perdagangan, arus investasi asing langsung (*foreign direct investment*), dan pembelian mata uang asing dalam jumlah yang sangat besar, telah membantu dalam menjadikan Cina sebagai negara pemegang cadangan devisa terbesar di dunia, yakni sebesar 1,9 triliun dolar pada akhir September 2008.⁹ Dengan terjadinya reformasi ekonomi, perencanaan ekonomi yang terpusat di Cina telah dibatasi, yaitu dengan mengembangkan mekanisme ekonomi pasar dan mengurangi peran pemerintah. Pemerintah Cina mengembangkan struktur ekonomi rangkap, yaitu dari sistem ekonomi sosialisme dengan perencanaan ekonomi terpusat menuju sistem ekonomi sosialisme pasar (sistem ekonomi pasar dengan karakter sosialisme).¹⁰ Kebangkitan ekonomi politik Cina diperkirakan akan dapat mengakhiri sikap unilateralisme AS sebagai akibat dari ketiadaan kekuatan baru yang mampu menandingi AS pasca runtuhnya komunisme Uni-Sovyet (US) pada akhir abad ke-20.

⁹ Wayne M. Morrison, *CRS Report for Congress - China's Economic Conditions*, 20 November 2008, Summary, <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf>, diakses pada tanggal 25 Juli 2009, hal 1.

¹⁰ Aa Kustia Sukarnaprawira, *op.cit.*, h. 165.

Sementara itu, kekuatan ekonomi negara-negara Eropa dan Jepang diperkirakan masih mengalami stagnasi, sehingga diperkirakan Cina akan menjadi kekuatan ekonomi politik yang disegani di kawasan Asia Pasifik setelah AS. Tidak heran jika negara-negara Barat, khususnya AS, menjadi gugup dengan apa yang mereka anggap sebagai ‘Kebangkitan Cina’, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Ekonomi Cina tumbuh dengan rata-rata 9 persen lebih pertahun selama lebih dari dua dasawarsa terakhir, sebagaimana dalam grafik di bawah ini.

Grafik 1
Pertumbuhan Ekonomi Cina Periode 1979-2009



Sumber : Keng - *China's Regional Economic Development* (Taipei, Linking)

Cina kini memiliki cadangan ekonomi terbesar di dunia dengan jumlah tiga kali lipat dari jumlah cadangan devisa seluruh negara Uni-Eropa. Pusat ekonomi dunia sepertinya tidak lagi berada di Eropa atau AS, tetapi di Asia. Pusat ekonomi tersebut tidak berada di negara maju, tetapi di negara berkembang yang mampu mengubah dirinya menjadi sejahtera, yakni Cina.¹¹ Cina sekarang adalah negara yang berbeda dibandingkan pada era pemerintahan Mao Zedong maupun Deng Xiaoping, setidaknya secara ekonomi, karena urusan politik belum banyak mengalami perubahan. Walaupun strata ekonomi sebagian besar rakyat Cina terangkat, Cina tetap mempertahankan kekuasaan partai komunis. Di Cina, komunisme masih tetap menjadi sumber kekuasaan maupun kekuatan politik dan ekonomi. Cina sering dianggap sebagai negara otoriter karena kekuasaan tunggal partai komunis, tetapi pada kenyataannya dalam kurun waktu 15 tahun terakhir dapat disaksikan munculnya kebebasan berbicara, informasi, bergerak, serta kebebasan mencari pekerjaan, sebuah kecenderungan baru yang tidak pernah ada presedennya dalam sejarah komunisme di Cina.¹²

¹¹ Taufik Adi Susilo, *China Connection*, Jakarta: Garasi, 2008, h. 18 dan 20.

¹² F.X. Sutopo, *China: Sejarah Singkat*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2009, h. 117.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah “Apa implikasi kemajuan ekonomi Cina pada hubungan Cina-AS pasca masuknya Cina menjadi anggota WTO pada tahun 2001.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memahami apa implikasi meningkatnya perekonomian Cina pada pelaksanaan hubungan Cina-AS pasca masuknya Cina menjadi anggota WTO pada tahun 2001. Adapun sasaran penelitian adalah agar tersedia informasi tentang implikasi kemajuan ekonomi Cina pada pelaksanaan hubungan Cina-AS pasca masuknya Cina menjadi anggota WTO pada tahun 2001.

1.4 Kerangka Teori

Dalam hubungan internasional dikenal berbagai perspektif teori, yang digunakan untuk melakukan pendekatan dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam hal ini, penulis menguraikan tiga perspektif teori di antara keseluruhan perspektif teori yang ada dalam kajian ilmu hubungan internasional. Perspektif-perspektif teori dimaksud adalah teori realisme, teori liberalisme, dan teori marxisme, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1.4.1 Teori Realisme

Pada bagian ini akan disampaikan diskusi tentang teori realis, yakni teori dari E.H. Carr dan teori dari Hans J. Morgenthau, yang beraliran realisme neoklasik, serta teori dari Kenneth Waltz dan teori dari John Mearsheimer, yang beraliran neorealisme. Selanjutnya akan disampaikan kritik dan aplikasi teori-teori tersebut jika diterapkan pada situasi hubungan Cina-AS. Perlu disampaikan bahwa pandangan E.H. Carr dan Hans J. Morgenthau sangat dipengaruhi oleh situasi yang melatarbelakanginya, yaitu pada saat pecahnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sedangkan pandangan Kenneth Waltz dan John Mearsheimer sangat dipengaruhi oleh situasi Perang Dingin pasca Perang Dunia II.

E.H. Carr, dalam buku *The Twenty Years' Crisis 1919-1939*, berpendapat antara lain bahwa hubungan internasional berangkat dari adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dalam, antar negara maupun antar masyarakat. Sebagian negara dan sebagian masyarakat memiliki kelebihan dari yang lain. Mereka berupaya memelihara dan mempertahankan kelebihan tersebut. Sementara itu, negara atau masyarakat yang tidak memiliki kelebihan akan berjuang mengubah situasi dirinya.¹³ Hubungan internasional menurut E.H. Carr pada dasarnya merupakan perjuangan kepentingan dan keinginan antar negara atau masyarakat yang bertentangan.¹⁴ Selanjutnya, Hans J. Morgenthau, dalam buku *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, berpendapat bahwa hubungan dan politik internasional pada dasarnya merupakan hubungan antar negara, yaitu masing-masing negara berupaya untuk memperjuangkan kekuasaan dan mendominasi negara lain melalui kekuatan militer (*struggle for power*).¹⁵ Negara sebagai aktor utama hubungan internasional dipandang sebagai individu yang senantiasa mempunyai hasrat untuk mendominasi individu yang lain atau sekurang-kurangnya mempertahankan keamanan dirinya masing-masing. Dengan demikian, hubungan internasional diasumsikan sebagai kumpulan negara-negara yang memperjuangkan keamanan dan kepentingan nasional masing-masing dengan instrumen utamanya adalah kekuatan dan keunggulan militer.¹⁶

Kritik yang dapat disampaikan terhadap teori Carr dan Morgenthau, yakni bahwa kedua teori tersebut sudah tidak aktual lagi untuk membahas situasi hubungan internasional saat ini, termasuk hubungan Cina-AS, karena saat ini globalisasi yang ditandai dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan peta hubungan internasional. Globalisasi dengan berbagai variannya telah mengubah politik internasional dengan mulai mengemukanya aktor non-negara sebagai aktor dominan selain aktor negara, bahkan dengan kapasitas dan kapabilitas interaksi yang melebihi aktor negara.

¹³ Edward Hallet Carr, "The Twenty Years's Crisis 1919-1939", London: Mac Millan & Company, Limited, 1946, seperti dikutip dalam Robert Jackson & Georg Sorensen (eds), *Introduction to International Relations*, New York: Oxford University Press, 1999, h. 54-57.

¹⁴ Robert Jackson & Georg Sorensen, *loc.cit.*

¹⁵ Hans J. Morgenthau & Kenneth W. Thompson, "Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace", New York: Alfred A. Knoff Inc., 1948, seperti dikutip dalam Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, New York: McMillan Publishing Company, 1990, h. 86.

¹⁶ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *loc.cit.*

Hal tersebut menjadikan tata-interaksi internasional menjadi kompleks. Dalam konteks hubungan Cina-AS, selain terjadi interaksi antar kedua negara, juga terjadi interaksi antar aktor non-negara, misalnya antar *multinational corporation* (MNC) maupun lembaga swadaya masyarakat internasional yang beroperasi dan berinteraksi secara independen melampaui batas-batas negara. Agenda keamanan negara juga mengalami pergeseran atau perubahan, yang semula didominasi oleh aspek militer telah meluas dengan meliputi pula aspek-aspek non-militer, misalnya aspek ekonomi yang memfokuskan pada hubungan atau persaingan perdagangan antar negara, sanksi ekonomi, embargo, dan lain sebagainya.

Selain itu, penggunaan teori Carr dan teori Morgenthau relatif sulit dipertahankan untuk memahami situasi hubungan Cina-AS saat ini. Pertimbangannya bahwa Cina yang dalam sejarahnya pernah menganggap dirinya sebagai 'Kerajaan Tengah', yakni sebagai pusat dunia yang berhak untuk memerintah seluruh umat manusia,¹⁷ namun harapan untuk menjadi kekuatan hegemon yang berkuasa di luar wilayahnya ternyata tidak menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dapat diterima sebagai pemahaman bahwa kemajuan ekonomi dan pembangunan kekuatan militer Cina saat ini tidak ditujukan untuk memperjuangkan kekuasaan dan mendominasi wilayah lain, namun lebih ditujukan untuk mempertahankan diri dan mengantisipasi ancaman-ancaman dari luar yang dapat membahayakan pencapaian kepentingan dan tujuan nasionalnya. Mulai awal abad ke-21, Cina nampaknya menghadapi ancaman militer yang nyata, terutama ancaman militer dari AS yang melindungi Taiwan berdasarkan *Taiwan Relation Act 1979*, dan jika hal ini sewaktu-waktu meledak dapat membahayakan.¹⁸ Cina mengartikan kekuatan ancaman atas keamanan nasionalnya dalam pemahaman yang komprehensif. Hal tersebut berarti ancaman yang datang dari dalam negeri merupakan segala-galanya dan ancaman yang datang dari luar selalu dilihat dalam konteks yang menyulitkan keamanan dalam negeri.¹⁹

¹⁷ Aa Kustia Sukarnaprawira, *op.cit.*, h. 5.

¹⁸ Zainuddin Djafar (ed.), *Perkembangan Studi Hubungan Internasional & Tantangannya*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1996, h. 201-205.

¹⁹ Aa Kustia Sukarnaprawira, *op.cit.*, h. 173.

Satu-satunya ancaman yang dianggap potensial dan komprehensif adalah langkah-langkah AS yang dianggap melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Cina, misalnya dalam kasus Taiwan serta tekanan-tekanan politik dengan mengusung isu hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan, proliferasi persenjataan, dan isu-isu lain yang pada dasarnya dianggap sebagai upaya AS untuk menghancurkan ideologi dan sistem sosialisme, seperti yang terjadi di Rusia. Untuk menghadapi ancaman komprehensif yang terutama datangnya dari AS, yang dianggap selalu intervensi masalah dalam negeri Cina dengan membantu Taiwan, maka Cina setiap tahun selalu meningkatkan kekuatan dan kemampuan militernya untuk mengantisipasi risiko ancaman perang modern. Kekuatan militer tersebut juga untuk mengawal momentum strategis dalam upaya mewujudkan masyarakat Cina yang sejahtera melalui reformasi ekonomi untuk menjadi negara maju.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Cina perlu unggul dalam kekuatan militer yang diperlukan untuk memelihara kondisi damai yang berkelanjutan dan dalam lingkungan internal maupun internasional yang kondusif, sesuai pepatah "kalau ingin damai, bersiaplah untuk berperang" (*si vis pacem, para bellum*). Bagi AS, peningkatan kekuatan militer Cina justru dipandang sebagai ancaman kepentingan AS di Asia. Hal demikian mengakibatkan interaksi hubungan Cina-AS sejak normalisasi pada tahun 1979 selalu berfluktuasi, kadang dalam kondisi baik dan tidak jarang dalam kondisi buruk, namun tidak terjadi konflik antar kedua negara. Jika terjadi kondisi 'memanas', hal tersebut lebih disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan yang mendasar antar kedua negara dalam memandang isu-isu aktual yang terjadi. Sebaliknya, 'pertemuan kepentingan' sering pula terjadi, misalnya dalam isu pemberantasan terorisme, isu pencegahan senjata nuklir, dan sebagainya. Oleh karena itu, meminjam istilah David Shambaugh, dalam tulisannya yang berjudul *Pattern of Interaction in Sino-American Relations*, pola hubungan Cina-AS digambarkan seperti siklus *love and hate relationship* karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan kepentingan kedua negara yang dilatarbelakangi oleh perbedaan sistem nilai, stereotip, sistem ekonomi dan politik, sejarah, dan lain sebagainya.²⁰

²⁰ Zainuddin Djafar, *op.cit.*, h. 203-204.

Pandangan Shambaugh ini dapat dikatakan telah meredusir teori Carr dan Morgenthau karena perilaku hubungan AS terhadap Cina yang mendua (*love and hate relationship*). Pada satu sisi, AS mengakui bahwa Cina sebagai negara yang berdaulat atas wilayah Taiwan berdasarkan *Komunike Shanghai 1979*; namun sebaliknya pada sisi yang lain, AS melakukan perlindungan atas kedaulatan wilayah Taiwan terhadap ancaman militer dari Cina berdasarkan *Taiwan Relation Act 1979*.²¹

Selanjutnya, teori realis lain seperti dikemukakan oleh Kenneth Waltz, dalam buku *Theory of International Politics*, yang mengatakan antara lain bahwa interaksi negara-negara membentuk struktur sistem internasional yang pada gilirannya menjadi variabel independen untuk menjelaskan perilaku negara. Menurut Waltz, titik tolak kepentingan negara tidak hanya kepentingan nasional saja, tetapi juga untuk kepentingan lingkungan sistemiknya, sehingga terjadi adanya distribusi atau polarisasi kekuatan (*distribution of power*) di antara negara-negara yang menjadi elemen sistem tersebut.²² Jadi, fokus Waltz adalah pada struktur sistem internasional dan konsekuensi struktur tersebut bagi hubungan internasional. Waltz berasumsi bahwa tidak ada pemerintahan dunia sehingga hubungan internasional bersifat anarki. Sistem internasional terdiri atas negara-negara besar dan kecil, yang masing-masing mempunyai kekuatan atau kapabilitas yang relatif berbeda satu sama lain.

Dengan demikian, menurut Waltz, hubungan internasional merupakan suatu situasi anarki yang terdiri dari negara-negara yang beragam dalam hal kekuatan atau kapabilitas relatifnya. Anarki dalam sistem internasional disebabkan negara-negara ingin mempertahankan kedaulatannya masing-masing. Sistem internasional yang ada pada masa Perang Dingin, yakni sistem bipolar didominasi oleh dua negara *superpower* (AS dan US). Kemudian, dengan mundur atau jatuhnya US, sistem internasional bergerak dari sistem bipolar menuju ke arah sistem multipolar. Dalam kondisi multipolar dengan AS sebagai kekuatan paling dominan, negara-negara lain yang berkekuatan besar cenderung menyeimbangkan satu sama lain.

²¹ *Ibid*, h. 204, 212, dan 214.

²² Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h. 15-16.

Meskipun AS mendominasi sistem bipolar, teori perimbangan kekuatan (*balance of power*) akan memunculkan negara lain yang berkekuatan besar menggiring kekuatan AS, sehingga terjadi keseimbangan. Sementara itu, negara-negara berkekuatan kecil cenderung mengaliansikan diri dengan negara-negara yang berkekuatan besar agar dapat mempertahankan otonomi maksimumnya.²³ Singkat kata, Waltz membedakan antara sistem *bipolar* pada masa Perang Dingin dan sistem *multipolar* pada pra maupun pasca Perang Dingin. Waltz yakin bahwa sistem bipolar pada masa Perang Dingin antara AS dan negara-negara sekutunya berhadapan dengan US dan negara-negara satelitnya, yang didukung oleh kekuatan militer yang relatif berimbang, dipandang lebih menjamin stabilitas karena menyediakan jaminan perdamaian dan keamanan yang lebih baik dibanding sistem multipolar.²⁴ Teori Kenneth Waltz ini dapat dikaitkan dengan teori John J. Mearsheimer, dalam bukunya *The Tragedy of Great Power Politics*, antara lain bahwa kekuatan-kekuatan besar dipastikan akan melakukan dominasi militer terhadap lingkungan kekuasaan mereka dan terus-menerus mencari cara untuk memperlihatkan kekuatan terhadap pesaing-pesaing mereka.²⁵ Mearsheimer menggunakan argumentasi Waltz yang berfokus diri pada stabilitas sistem bipolar daripada sistem multipolar.²⁶

Hubungan AS dan US dalam sistem bipolar pada masa Perang Dingin lebih terfokus pada kondisi keseimbangan kekuatan militer antara AS dan US. Pada saat ini, interaksi hubungan Cina-AS tidak dalam kondisi keseimbangan karena secara militer kekuatan AS jauh melebihi Cina; sebaliknya secara ekonomi, pertumbuhan Cina mampu mengungguli AS. Selain itu, interaksi hubungan AS dan US dalam Perang Dingin melibatkan negara-negara lain dalam aliansi, sedangkan interaksi hubungan Cina-AS tidak melibatkan negara-negara lain dalam aliansi. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa dengan runtuh atau bubarnya US dan berakhirnya Perang Dingin, maka berakhir pula sistem bipolar yang dikemukakan dalam teori Kenneth Waltz.

²³ Robert Jackson & Georg Sorensen, *op.cit.*, h. 66-67.

²⁴ *Ibid*, h. 110-111.

²⁵ Ted C. Fishman, *China Inc.: Bagaimana Kedigdayaan China Menantang Amerika dan Dunia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006, h. 388.

²⁶ Robert Jackson & Georg Sorensen, *op.cit.*, h. 117.

Saat ini telah terjadi perubahan atau pergeseran dalam perimbangan kekuatan strategis global, yakni sistem bipolar telah berganti ke arah sistem multipolar. Hal tersebut mendorong perubahan politik luar negeri Cina ke arah *independent foreign policy*.²⁷ Sistem internasional yang bipolar telah berubah, sehingga ancaman yang paling dirasakan oleh Cina saat ini adalah tatanan dunia yang cenderung bersifat unipolar dengan AS sebagai satu-satunya negara *superpower* di dunia yang cenderung bertindak unilateral. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa peningkatan ekonomi yang sangat pesat, peningkatan kekuatan militer, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Cina dengan 'mendekati' negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Uni-Eropa merupakan *grand strategy* dari Cina untuk membendung ambisi *superpower* AS di dunia, seperti pada era Presiden George W. Bush, yang cenderung bertindak unilateral, atau paling tidak dapat mengimbangi dominasi negara adidaya tersebut di kawasan Asia. Oleh sebab itu, kritik yang dapat disampaikan terhadap teori Waltz dan Mearsheimer, yakni penggunaan kedua teori tersebut sulit atau bahkan tidak mungkin dipertahankan untuk memahami situasi hubungan Cina-AS.

Untuk lebih memahami tentang Cina, dapat pula diperhatikan tulisan David Shambaugh berjudul *The Rise of China and Asia's New Dynamics*. Ia mengemukakan antara lain bahwa saat ini Asia sedang berubah dan Cina adalah sebagai penyebab utamanya. Cina telah memposisikan diri sebagai aktor utama dan sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dalam peningkatan stabilitas dan keamanan di kawasan. Saat ini, Cina telah menunjukkan sikap kepercayaan diri dalam urusan eksternalnya dan telah membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga serta aktif dalam organisasi-organisasi regional, multilateral, maupun global.²⁸ Selanjutnya dapat pula diperhatikan tulisan dari Avery Goldstein berjudul *Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International and International Security* yang antara lain mengatakan bahwa Cina melihat hubungan antara kekuatan-kekuatan besar saat ini sedang mengalami perubahan dan penyesuaian strategis.

²⁷ Zainuddin Djafar, *op.cit.*, h. 209.

²⁸ David Shambaugh, *China and Asia's New Dynamic*, Berkeley: University of California Press, 2006, h. 1.

Dalam kondisi seperti ini, upaya-upaya untuk memperluas dan memperkuat aliansi militer sudah bukan waktunya lagi dan tidak kondusif dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Aliansi model lama dalam pandangan Cina harus sudah digantikan oleh pendekatan baru yang disebut dengan *international partnership*, yang dalam prakteknya diwujudkan dalam komitmen untuk membangun hubungan bilateral yang stabil tanpa ditujukan pada pihak ketiga, meningkatkan dan mengembangkan hubungan ekonomi secara luas, meredam ketidaksepahaman untuk kepentingan kerjasama dalam diplomasi internasional, serta meningkatkan hubungan antar pejabat melalui kunjungan timbal-balik terutama pejabat militer maupun pertemuan puncak pemimpin negara secara berkala.²⁹

Selanjutnya, perlu diperhatikan pula tulisan Goldstein berjudul *Power Transitions, Institutions, and China's Rise in East Asia*. Dalam tulisan tersebut disebutkan antara lain bahwa dalam teori *balance of power* negara-negara memiliki kepentingan untuk bertahan (*survival*) dan kebanyakan negara-negara memiliki kepentingan dalam negeri yang membentuk kebijakan luar negerinya. Teori tersebut hanya menawarkan pandangan yang terbatas untuk fenomena negara yang sedang meningkat kekuatannya seperti Cina dan hanya menjelaskan mengapa negara-negara yang lebih lemah ingin mengurangi ancaman dari negara-negara yang lebih kuat, tetapi tidak menjelaskan bagaimana negara yang lemah tersebut merespon atas ancaman tersebut atau bagaimana negara-negara yang lain akan bertindak terhadap ancaman tersebut.³⁰ Dalam kaitan dengan masalah Cina, Goldstein menggarisbawahi teori institusionalis dari Robert Keohane dengan menawarkan optimisme bahwa peningkatan kekuatan Cina adalah diperuntukkan dalam rangka memaksimalkan kekuatan relatifnya terhadap musuh-musuhnya dan bukan diperuntukkan untuk meningkatkan konflik internasional.³¹

²⁹ Avery Goldstein, *Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International Security*, sponsored by the East-West Center Washington, California: Stanford University Press, 2005, h. 134.

³⁰ Avery Goldstein, "Power Transitions, Institutions, and China's Rise in East Asia", dalam buku G. John Ikenberry & Chung-in Moon, *The United States and Northeast Asia: Debates, Issues, and New Order*, Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2007, h. 41.

³¹ *Ibid*, h. 44.

Sesuai pandangan teori institusionalis, bahwa Cina kemungkinan tidak akan menantang melainkan berkeinginan untuk dapat bekerjasama atau berintegrasi dengan institusi-institusi internasional yang berada di bawah pimpinan AS. Kerjasama tersebut dilakukan bukan berdasarkan atas keinginan Cina untuk merangkul nilai-nilai atau keyakinan politik dari negara-negara lain, tetapi dikarenakan bahwa terintegrasinya Cina dengan institusi-institusi tersebut sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan Cina sendiri. Di samping itu, AS, demi kepentingan ekonomi dan keamanannya, ingin pula bekerjasama dengan Cina sebagai negara yang saat ini sedang meningkat, baik ekonomi maupun militernya.³²

Dari paparan diskusi dan kritik tentang teori realis di atas dapat diterima sebagai suatu pemahaman bahwa dalam kenyataannya hubungan internasional pada era global seperti sekarang ini sudah sedemikian kompleks. Selain aktor negara, interaksi internasional secara intensif juga melibatkan aktor-aktor non-negara maupun institusi-institusi internasional. Aktor-aktor non-negara atau maupun institusi-institusi internasional tersebut, seperti WTO, *International Monetary Fund* (IMF), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta lembaga-lembaga yang bernaung di bawahnya. Selain itu, meskipun konflik atau perang dalam skala lokal masih terjadi, keberadaan hukum internasional pada umumnya dipatuhi oleh sebagian besar negara-negara di dunia, sehingga sifat konfliktual dan pandangan anarki dalam hubungan internasional yang menjadi asumsi teori realis tidak seluruhnya tepat untuk diaplikasikan pada studi hubungan internasional pada sekarang ini.

Oleh karena itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan Cina dan AS pada saat ini perlu dianalisa dengan cara lain karena kondisi hubungan kedua negara saat ini bersifat sangat rumit atau kompleks. Meskipun kedua negara cenderung tidak bersahabat, kedua negara dalam realitanya juga saling membutuhkan bahkan mengalami saling ketergantungan satu sama lain, terutama dalam hubungan ekonomi dan perdagangan, baik pada lingkup bilateral, regional, maupun global, seperti saat sekarang ini.

³² *Loc.cit.*

1.4.2 Teori Liberalisme

Pada bagian ini akan disampaikan diskusi tentang teori liberalisme, khususnya setelah masa Perang Dunia II hingga pasca Perang Dingin, antara lain disampaikan oleh John Burton yang beraliran liberalisme sosiologis, David Mitrany, Ernst B. Haas, serta Robert Keohane dan Joseph S. Nye, Jr. yang beraliran liberalisme interdependensi dan liberalisme institusional.

John Burton, dalam bukunya berjudul *World Society* (1972), mengajukan suatu model ‘jaring laba-laba’ dalam hubungan transnasional untuk menunjukkan bahwa sejak tahun 1950 hingga 1960, setiap negara-bangsa di Eropa Barat, yang terdiri dari banyak kelompok masyarakat berbeda, memiliki tipe hubungan eksternal berbeda dan tipe kepentingan berbeda pula. Model jaring laba-laba menunjuk pada dunia yang lebih didorong oleh kerjasama saling menguntungkan.³³ Kritik terhadap teori Burton adalah bahwa teori yang berkaitan dengan kondisi umum negara-negara di Eropa Barat tersebut kurang sesuai untuk memahami hubungan Cina-AS secara khusus karena kondisi keperbedaan yang ada pada kedua negara tidak memunculkan terjadinya kerjasama, tetapi keperbedaan latar belakang kondisi internal di Cina maupun AS justru merupakan penyebab terjadinya kondisi fluktuatif dalam hubungan kedua negara, kadang bekerjasama dan tidak jarang pula terjadi pertentangan.

David Mitrany, dalam tulisannya berjudul *The Functional Approach to World Organization I* (1948) dan dalam bukunya berjudul *A Working Peace System* (1966), berkeyakinan bahwa proliferasi menyangkut masalah-masalah bersama, seperti dalam penggunaan teknologi modern maupun pencegahan penggunaan senjata pemusnah massal, secara logis menuntut respon kolaboratif negara dan bahwa aktor non-negara dapat berperan penting dalam kolaborasi tersebut. Aktor-aktor non-negara, khususnya para pakar di bidang teknik tertentu yang non-politis, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat modern. Kepada para pakar non-politis ini perlu diberikan fasilitas untuk berkolaborasi satu sama lain di bidang ekonomi, sosial, dan saintifik.

³³ James Burton, “World Society”, Cambridge: Cambridge University Press, 1972, dalam buku Robert Jackson & Georg Sorensen, *op.cit.*, h. 63, 145, dan 149.

Keberhasilan kolaborasi di bidang teknik tertentu akan mengantar pada kolaborasi di bidang-bidang lain terkait. Proses ini disebut Mitrany sebagai *ramification*. Pemerintah akan mengakui keuntungan yang diperoleh dari kolaborasi, dan karenanya mendorong perluasan kolaborasi yang lain. Mitrany menekankan bahwa kesepakatan dalam bidang ekonomi seperti bidang transportasi, komunikasi, dan keuangan memberi kontribusi terhadap perkembangan integrasi politik, sehingga hubungan internasional tidak bersifat *zero sum game* tetapi lebih bersifat *a variable or positive sum game*.³⁴

Para pakar akan memberikan solusi pada masalah umum dalam berbagai bidang fungsional, misalnya transportasi, komunikasi, keuangan, dan lain-lain. Kerjasama teknik dan ekonomi akan meluas ketika para partisipan mendapatkan keuntungan timbal-balik. Ketika warga negara melihat peningkatan kesejahteraan sebagai akibat kerjasama dalam organisasi internasional, mereka akan mengubah kesetiaan mereka dari negara kepada organisasi internasional. Dalam hal ini, interdependensi ekonomi memberi kontribusi terhadap perkembangan integrasi politik dan mewujudkan perdamaian.³⁵ Kritik terhadap teori Mitrany adalah bahwa teori yang berkaitan dengan kondisi umum negara-negara di Eropa Barat sejak tahun 1950 hingga 1960 tersebut kurang sesuai untuk digunakan dalam memahami hubungan Cina-AS secara khusus karena kerjasama non-politis yang terjadi antara kedua negara dan masyarakatnya tidak mengakibatkan munculnya integrasi politik antara kedua negara.

Ernst B. Haas, dalam tulisannya berjudul *Turbulent Fields and the Theory of Regional Integration* (1976)³⁶, mendeskripsikan bahwa di Eropa Barat pada tahun 1950-1960 terjadi kondisi *turbulent*, sehingga terdapat persepsi yang membingungkan dan bertentangan tentang aktor organisasional. Aktor-aktor tersebut merasa berada dalam konteks kompleksitas sosial, yang di antara masing-masing aktor-aktor organisasional memiliki tujuan yang tidak selaras satu sama lain.

³⁴ David Mitrany, "The Functional Approach to World organization", *International Affairs*, Vol 24, No. 3, July, 1948 dan David Mitrany, "A Working Peace System", Chicago: Quadrangle Books, 1966, dalam buku Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 153-154.

³⁵ Robert Jackson, *op.cit.*, hal 149.

³⁶ Ernst B. Haas, "Turbulent Fields and the Theory of Regional Integration", 1976, dalam buku Robert Jackson & Georg Sorensen, *op.cit.*, hal 149.

Masing-masing aktor yang terikat dalam jaringan interdependensi menyadari bahwa harus dilakukan suatu upaya kerjasama untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh mereka. Upaya untuk menyelesaikan kompleksitas tersebut meningkat menjadi agenda politik yang besar pada akhir abad 20. Negara-negara di dunia berusaha untuk mencari solusi atau penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan hal ini berdampak kepada tujuan dari integrasi fungsional di Eropa Barat. Integrasi fungsional tersebut selanjutnya disubordinasikan pada teori umum tentang interdependensi. Inti dari argumen yang dinyatakan oleh Haas adalah *reciprocal effects among countries or among actors in different countries*. Dengan demikian, sesuatu yang terjadi di satu negara akan mempengaruhi negara lain. Negara yang satu akan merasa sensitif terhadap apa yang sedang terjadi di negara lainnya. Ada kerugian atas sensitivitas tersebut, namun ada pula keuntungannya apabila negara-negara saling bekerjasama.³⁷

Kritik yang dapat diberikan terhadap teori Haas adalah bahwa teori yang berkaitan dengan kondisi umum negara-negara di Eropa Barat pada periode antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1960 tersebut kurang sesuai digunakan untuk memahami hubungan Cina-AS secara khusus. Hal tersebut dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hubungan kedua negara bukan disebabkan karena adanya kondisi *turbulent* yang tidak menentu seperti yang pernah terjadi di Eropa Barat pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1960, melainkan lebih disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dalam merespon isu-isu aktual yang terjadi karena latar belakang domestik masing-masing negara yang berakibat terjadinya kondisi fluktuatif dalam hubungan Cina-AS sejak normalisasi hubungan pada tahun 1979, yakni kadang terjadi hubungan kerjasama dan tidak jarang pula terjadi pertentangan. Hubungan kerjasama tersebut misalnya terjadi dalam pemberantasan terorisme internasional maupun tindakan-tindakan kriminal yang bersifat transnasional lainnya, namun pertentangan antara kedua negara juga tidak jarang terjadi, seperti dalam kasus Taiwan.³⁸

³⁷ Robert Jackson, *op.cit.*, h. 149.

³⁸ *Loc.cit.*

Robert Keohane dan Joseph S. Nye, Jr., dalam tulisannya yang berjudul *International Interdependence and Integration* (1977)³⁹, menghubungkan antara interdependensi yang kompleks dan fenomena integrasi. Keohane dan Nye berargumen interdependensi kompleks merupakan kondisi penting yang bisa mengarah pada terwujudnya integrasi. Inti argumen teori interdependensi kompleks adalah bahwa interdependensi yang merupakan kondisi saling ketergantungan di antara negara-negara menjadi variabel penting bagi integrasi. Interpendensi mengandung makna adanya *mutual effect* dalam hubungan di antara negara-negara. Interdependensi ini bisa bersifat asimetrik dan melibatkan negara-negara dalam posisi *power* yang tidak seimbang. Sifat dan karakter ketidakseimbangan ini tentu saja membawa dampak terhadap prospek integrasi itu sendiri. Bagaimanapun kondisi negara-negara yang terlibat, interdependensi merupakan faktor penting bagi integrasi.⁴⁰

Keohane dan Nye menyebutkan tiga ciri dari *complex interdependence*. *Pertama*, hubungan internasional atau politik global dilaksanakan melalui *multiple channels* atau banyak jalur, di samping jalur resmi pemerintah (*interstate*). Sebagai aktor dalam politik global, negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang *unitary* dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren (*transgovernmental*). Selain negara, banyak faktor lain yang berperan dalam politik global (*transnational*), seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan lain-lain. *Kedua*, ada banyak isu yang berkembang dalam politik global dan tidak selalu isu militer atau keamanan mendominasi isu-isu lain. Pada suatu keadaan tertentu, isu ekonomi bisa mendominasi hubungan internasional antara dua negara atau lebih dan pada saat yang lain isu lingkungan hidup juga menjadi agenda yang dominan. *Ketiga*, kekuatan militer tidak selalu relevan sebagai instrumen dalam politik global. Misalnya dalam mengatasi konflik dalam bidang perdagangan dan investasi, kekuatan militer menjadi tidak relevan, meskipun negara-negara yang terlibat terkait dalam suatu kerjasama atau aliansi militer.⁴¹

³⁹ Robert Keohane dan Joseph S. Nye, Jr., *International Interdependence and Integration*, Boston: Little, Brown, 1977.

⁴⁰ Yulius P. Hermawan, *op.cit.*, h. 155-156.

⁴¹ Aleksius Jemadu, *op.cit.*, h. 46.

Teori *complex interdependence* tersebut di atas memberikan alternatif yang sangat bermanfaat untuk memahami berbagai isu dalam dinamika politik global saat ini. Teori ini kiranya lebih tepat diaplikasikan untuk melakukan pendekatan atas berbagai isu yang terjadi dalam hubungan Cina-AS saat ini. Untuk memahami penerapan teori ini dapat digambarkan interaksi Cina-AS yang bersifat multi dimensional yang melibatkan aktivitas aktor negara maupun aktor non-negara. Aktivitas aktor negara selain untuk penanganan isu yang berkaitan dengan keamanan misalnya dalam pemberantasan terorisme global maupun kejahatan transnasional lainnya, juga untuk penanganan isu non-keamanan yakni isu yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan perdagangan baik pada tataran bilateral, regional maupun global, karena hubungan Cina-AS saat ini jauh lebih kompleks daripada isu keamanan saja. Dalam tingkatan aktor negara, Cina-AS saat ini tengah terlibat dalam persaingan ekonomi perdagangan. AS selalu mengalami defisit neraca perdagangan terhadap Cina. AS telah berkali-kali meminta Cina agar melakukan apresiasi mata uang yuan Cina terhadap dollar AS untuk mengurangi defisit neraca perdagangan AS, namun karena Cina tidak menanggapinya, maka AS menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui *World Trade Organization* dengan menuduh Cina telah melakukan politik *dumping* dalam perdagangan kedua negara. Dalam kasus ini, meskipun kekuatan militer AS lebih unggul terhadap kekuatan militer Cina tetapi hal tersebut menjadi tidak relevan dan tidak dapat digunakan untuk memaksa Cina.

Robert Keohane, dalam bukunya yang lain berjudul *International Institutions and State Powers* (1989), juga mengemukakan teori *institutionalist*. Menurutnya, ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan sering membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan dengan mengurangi biaya. Institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal, seperti WTO, *European Union* (EU), *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal (sering disebut *regimes*) yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama, seperti perjanjian tentang pengapalan, penerbangan, komunikasi, atau lingkungan.

Neoliberalisme ini disebut liberalisme institusional. Pandangan liberal-institusionalis (*institutionalist*) ini memiliki beberapa asumsi dasar. *Pertama*, *institutionalist* mengakui keberadaan aktor negara dan non-negara. Negara merupakan perwakilan resmi yang memiliki legitimasi dari masyarakat. Meskipun menekankan pentingnya aktor non-negara, namun aktor non-negara berada di bawah aktor negara. *Kedua*, bagi *institutionalist*, struktur sistem internasional berada dalam kondisi yang anarki. Kondisi sistem internasional yang anarki dapat diatasi melalui pembentukan institusi internasional yang berperan sebagai mediator. *Keempat*, pada prosesnya, interaksi pada tingkat regional dan global semakin meningkat sehingga akan berkembang ke arah integrasi. *Kelima*, *institutionalist* berpendapat bahwa dunia saat ini bukan lagi *zero sum game*, yakni dengan satu aktor menang dan aktor yang lainnya kalah, namun berupa *variable sum game*, yakni melalui kerjasama maka semua aktor akan mendapatkan keuntungan bersama.⁴²

Institusi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari oleh struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Institusi internasional tersebut diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dengan melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun antar sesama kelompok organisasi non-pemerintah (*non-governmental organization*) pada negara yang berbeda.⁴³

Untuk memahami aplikasi teori *institutionalist* tersebut dalam konteks hubungan Cina-AS dapat diperhatikan tulisan Avery Goldstein yang berjudul *Power Transition, Institution, and China Rise in East Asia: Theoretical Expectation and Evidence* (2007). Tentang teori *institutionalist*, Goldstein antara lain menyatakan bahwa institusi internasional dapat mengurangi kondisi anarki dan mengupayakan pemenuhan kepentingan nasional negara-negara melalui kerjasama.

⁴² Robert O. Keohane, *International Institutions and State Power*, Boulder: Westview Press, 1989, h. 9.

⁴³ John. T. Rourke, *International Politics on the World Stage*, New York: Dushkin Publication, 1991, h. 442.

Oleh karena itu, menurut Goldstein, dalam institusi internasional, dampak potensial yang mengganggu hubungan kedua negara selaku *rising power* dalam pemenuhan keuntungan relatif masing-masing negara dapat dielakkan, sehingga dapat menghindari konflik karena memungkinkan terjadinya kerjasama yang menguntungkan secara timbal-balik meskipun dalam kondisi internasional yang anarki. Mendasarkan pada pendapat Keohane, Goldstein optimis bahwa Cina tidak perlu melakukan konflik dalam hubungan internasional. Dikatakan lebih lanjut bahwa institusi internasional dapat menyediakan informasi dan harapan untuk mendapatkan keuntungan melalui kerjasama. Menurut Goldstein, Cina akan tetap berintegrasi dengan institusi-institusi internasional yang dipimpin oleh AS. Teori *institutionalist* menyarankan bahwa keinginan untuk melanjutkan perolehan keuntungan dari perdagangan bebas dan iklim investasi dapat memotivasi Cina dalam memfasilitasi kerjasama.⁴⁴ Teori tersebut juga menyediakan landasan optimisme tentang prospek untuk melanjutkan perdamaian di Selat Taiwan dalam dua alasan. *Pertama*, integrasi dengan institusi internasional bagi Cina guna memperkuat kepentingan politik domestiknya untuk menghindari cara kekerasan dalam masalah Taiwan. *Kedua*, penggunaan kesabaran daripada kekerasan oleh Cina membantu dalam mengurangi keinginan Taiwan untuk merdeka.⁴⁵ Meskipun begitu, AS menawarkan jaminan kepada Taiwan bahwa AS tidak akan meninggalkan Taiwan dalam hal menghadapi kekerasan yang akan dilakukan oleh Cina, tetapi AS juga memperingatkan bahwa AS tidak akan terjebak dalam konflik yang diakibatkan oleh ketekatan Taiwan untuk merdeka.⁴⁶ Untuk memahami aplikasi teori *institutionalist* tersebut dalam konteks hubungan Cina-AS dapat juga diperhatikan tulisan Quansheng Zhao dan Guoli Liu berjudul *The Challenges of a Rising China* (2007), yang mengemukakan pernyataan Zbigniew Brzezinski bahwa kepemimpinan Cina cenderung tidak menantang militer AS, tetapi lebih fokus pada pembangunan ekonomi, sehingga konflik dengan AS dapat dielakkan. Dalam tulisan tersebut, menurut Zhao dan Liu, AS adalah satu-satunya kekuatan global sementara Cina masih merupakan kekuatan regional.

⁴⁴ Avery Goldstein, "Power Transition, Institution, and China Rise in East Asia: Theoretical Expectation and Evidence", dalam *The Journal of Strategic Studies*, Vol. 30, No. 4-5, 2007, h. 44-46.

⁴⁵ *Ibid*, h. 58.

⁴⁶ *Ibid*, h. 61.

Semenjak berakhirnya Perang Dingin, selain menjalankan tindakan-tindakan revolusionernya, Cina juga menempuh kebijakan bertetangga baik dan bertanggung jawab seperti misalnya dalam hal penyelenggaraan *Six Party Talks* yang membahas krisis nuklir Korea Utara maupun keterlibatan Cina pada konferensi tahunan APEC di Hanoi, Vietnam, pada bulan Nopember 2006. Langkah-langkah tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa Cina telah memulai untuk menggantikan atau mengambil alih posisi AS, setidaknya dalam tingkat regional di Asia, sehingga menunjukkan pandangan yang lebih baik terhadap negara tersebut.⁴⁷

Selanjutnya, Zhao mengemukakan kerangka teori *Managed Great Power Relations* (MGPR). Secara teori, MGPR dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan yang rumit atau kompleks antara Cina dan AS, seperti dalam permasalahan nuklir Korea Utara maupun kasus Taiwan, yang penanganannya memerlukan tiga hal. *Pertama*, keinginan negara-negara untuk berkoalisi harus ada, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk saling melengkapi dan menciptakan keuntungan timbal-balik melalui kerjasama. *Kedua*, karena kerjasama adalah hal yang sulit untuk dijaga, maka dorongan yang cukup harus diciptakan sedapat mungkin untuk mengatasi kepentingan yang berbeda-beda. *Ketiga*, mekanisme dan institusi yang efektif harus dibangun untuk bertindak sebagai kendaraan guna memfasilitasi kerjasama rutin di antara negara-negara besar.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, kerjasama di antara Cina-AS tersebut memerlukan enam elemen. *Pertama*, menggabungkan pola pikir untuk menyediakan dasar bagi rasa saling percaya. *Kedua*, dorongan bagi kedua negara besar untuk bekerjasama. *Ketiga*, metode yang konstruktif dalam menangani politik domestik. *Keempat*, pembangunan institusi dan mekanisme yang efektif. *Kelima*, langkah-langkah pencegahan krisis. *Keenam*, hubungan berbagai lapisan untuk menjaga dan memperluas basis-basis umum. Hal tersebut tampak dalam penyelenggaraan *Six Party Talks*, yang setidaknya terdapat empat faktor yang mempengaruhi keputusan Cina.

⁴⁷ Quansheng Zhao, *Managed Great Power Relations: Do We See 'One-Up and One-Down'?*. The Journal of Strategic Studies, Vol. 30, No. 4-5, 2007, h. 610, 617, 619.

Pertama, kebijakan luar negeri Cina yang prioritas terus dilanjutkan untuk menjaga kestabilan dan kedamaian lingkungan internasional, sehingga Cina dapat lebih banyak berkonsentrasi dalam bidang ekonomi. *Kedua*, Cina menginginkan untuk menyeimbangi uniteralisme AS dalam hubungan internasional. *Ketiga*, Cina memiliki masalah kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri dalam isu Taiwan, yang membutuhkan kerjasama erat antara Cina dan AS dalam hal menghindari kemungkinan perubahan kebijakan AS tentang Taiwan.⁴⁸ Untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran di seluruh dunia, kedua negara ini mengalami saling ketergantungan dalam strategi, ekonomi, dan dimensi politik yang telah melekat. Dengan kata lain, untuk mencapai MGPR, kedua negara membutuhkan dasar bagi kerjasama, perencanaan institusional, dan mekanisme pencegahan krisis.⁴⁹

Menurut Quansheng Zhao & Guoli Liu, hubungan antara Cina dan AS telah memasuki periode atau babak baru yang memunculkan setidaknya empat faktor. *Pertama*, strategi anti-terorisme AS, yang dijalankan setelah tragedi WTC pada tahun 2001, memperluas dasar bagi kerjasama antara AS dan Cina. *Kedua*, kedua negara menaruh keseriusan dalam hal proliferasi senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*) dan telah melakukan kerjasama secara konstruktif melalui media *Six Party Talks* dalam penanganan masalah nuklir Korea Utara.⁵⁰ *Ketiga*, kedua negara telah menyadari akan kesensitifitasan mengenai isu Taiwan, sehingga AS telah mengakui kebijakan *One China Policy* dan Cina telah menunjukkan pendiriannya dengan melakukan usaha-usaha perdamaian dalam menyelesaikan isu Taiwan tersebut. *Keempat*, peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan di antara Cina dan AS telah menciptakan hubungan ekonomi yang luas dan kuat bagi kedua negara. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa melalui aplikasi teori *institutionalist* berarti bahwa peningkatan kemajuan Cina merupakan kesempatan untuk membangun kerjasama daripada meningkatkan konflik atau ancaman.⁵¹

⁴⁸ Quansheng Zhao, *op.cit.*, h. 623 - 628.

⁴⁹ *Ibid*, h. 634 dan 635.

⁵⁰ Quansheng Zhao & Guoli Liu, *The Challenges of a Rising China*, *The Journal of Strategic Studies*, Vol. 30, No. 4-5, h. 592.

⁵¹ *Loc.cit.*

Setelah dikemukakan beberapa aliran dalam teori liberalisme seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atas, selanjutnya dapat diperhatikan pandangan Robert P. Gilpin dalam buku yang berjudul *U.S. Power and Multinational Corporations* dan *The Political Economy of International Relations* (1975). Dalam bukunya tersebut, Gilpin mencoba untuk mengintegrasikan antara studi politik internasional yang berfokus pada peran kekuasaan negara dalam membentuk pola hubungan internasional, dengan studi politik ekonomi internasional yang berfokus pada dinamika interaksi antara perusahaan transnasional dan pasar global. Dalam situasi perekonomian pasar global semakin terintegrasi, arus perdagangan barang dan jasa yang semakin terbuka, dan kiprah perusahaan-perusahaan transnasional yang semakin nyata, sehingga dalam upaya untuk memahami bagaimana *power* dimanifestasikan di dalam hubungan antar bangsa, maka para pengamat harus mengintegrasikan antara konsep ekonomi dengan ilmu politik.⁵²

Oleh karena itu, maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa teori liberalisme terutama aliran *interdependence* dan *institutionalist* kiranya dapat diaplikasikan pada hubungan Cina-AS saat ini dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, dalam hubungan Cina-AS, selain melibatkan aktivitas aktor negara juga melibatkan aktivitas aktor non-negara. *Kedua*, dalam hubungan Cina-AS dianut mekanisme pasar dan terjadi interdependensi ekonomi antara kedua negara yang sifatnya sangat kompleks. *Ketiga*, dalam hubungan Cina-AS, kekuatan *superior* AS yang sudah melembaga sejak akhir Perang Dunia Kedua menjadi tidak relevan lagi digunakan untuk mengatasi terjadinya konflik atau 'perang' dagang yang terjadi di antara kedua negara. *Keempat*, dalam hubungan Cina-AS, kerjasama kedua negara dilakukan dengan menghormati lembaga-lembaga dan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku. *Kelima*, dalam hubungan Cina-AS selama ini telah terjadi kerjasama dan saling ketergantungan antara kedua negara dalam merespon isu-isu aktual yang terjadi, baik pada tataran bilateral, regional, maupun global.

⁵² Robert P. Gilpin, "U.S. Power and Multinational Corporation", New York: Basic Books, 1975, dan Robert P. Gilpin, "The Political Economy of International Relations", Princeton: Princeton University Press, 1987, dalam Yulius P. Hermawan. *op.cit.* h. 12.

Selain relevan digunakan sebagai dasar teori untuk melakukan pendekatan atas dinamika yang terjadi dalam hubungan Cina-AS, secara faktual aplikasi teori liberalisme aliran *interdependence* dan aliran *institutionalist* saat ini, maka selain berdampak pada meningkatnya hubungan kerjasama dan saling ketergantungan antara Cina dan AS, juga cenderung berimplikasi pada terjadinya peredaan ketegangan di Selat Taiwan antara Cina-AS di satu sisi dan Cina-Taiwan di sisi lain, yang antara lain ditandai oleh adanya kenyataan sebagai berikut. *Pertama*, meskipun Cina, AS, dan Taiwan masing-masing saling meningkatkan kekuatan militernya, namun konflik militer tidak terjadi. *Kedua*, tendensi perkembangan hubungan Cina-Taiwan saat ini justru lebih meningkat di bidang ekonomi perdagangan dan cenderung mengenyampingkan faktor politik, sehingga solusi perdamaian Cina-Taiwan menjadi semakin terbuka.

1.4.3 Teori Marxisme

Pada bagian ini akan disampaikan uraian tentang teori marxisme, khususnya pada pasca Perang Dunia II maupun masa Perang Dingin, antara lain disampaikan oleh Andre Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Samir Amin, Immanuel Wallerstein, dan Robert W. Cox, yang beraliran neomarxisme.

Andre Gunder Frank, dalam bukunya berjudul *Capitalism and Underdevelopment in Latin America* (1967), mengemukakan *dependency theory* dengan menolak pandangan kaum liberalis bahwa politik global dicirikan oleh interdependensi, karena yang terjadi hanyalah ketergantungan negara-negara berkembang (*developing countries*) kepada negara-negara maju (*developed countries*) sebagai tempat terjadinya akumulasi modal atau kapital. Hal tersebut seperti halnya yang terjadi di negara-negara berkembang di kawasan Amerika Latin. Di kawasan ini, yang terjadi hanyalah fenomena *underdevelopment* atau keterbelakangan ekonomi sebagai akibat dari hubungan yang eksploitatif dengan negara-negara yang maju.⁵³ Hubungan ketergantungan pada umumnya dan hubungan metropolis-satelit (*metropolis-satelite relationship*) dalam suatu sistem kapitalisme dunia pada khususnya dicirikan oleh sifat monopolistik dan ekstraktif.

⁵³ Andre Gunder Frank, "Capitalism and Underdevelopment in Latin America", New York Monthly Press, 1967, dalam buku Aleksius Jemadu, *op.cit.*, h. 53.

Negara-negara metropolis memiliki kontrol monopolistik atas hubungan ekonomi dan perdagangan di negara-negara satelit. Dominasi monopolistik dalam suatu pasar jelas merupakan sebuah posisi kekuasaan. Posisi kekuasaan ini memungkinkan negara-negara metropolis untuk mengeruk surplus ekonomi dari negara-negara satelit sebagai dampak dari dominasi negara-negara metropolis tersebut. Sementara itu, negara-negara satelit tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol pertumbuhannya sendiri melainkan akan tetap tergantung pada metropolis. Hubungan monopolistik dan ekstraktif pada awalnya dibentuk melalui kekuatan senjata dan setelah itu dilanjutkan melalui struktur ketergantungan dan keterbelakangan.⁵⁴

Teori Frank yang dilatarbelakangi oleh kondisi umum di negara-negara Amerika Latin tersebut kurang sesuai untuk digunakan dalam memahami hubungan Cina-AS secara khusus. Pertimbangannya bahwa meskipun Cina termasuk dalam kategori negara berkembang, kondisi negara tersebut tidak berada dalam hubungan ketergantungan (*dependency*) terhadap AS, demikian pula sebaliknya. Kondisi hubungan Cina-AS tidak bersifat eksploitatif, hubungan kedua negara justru cenderung dalam kondisi saling ketergantungan (*interdependency*) dan saling membutuhkan. Hubungan Cina-AS tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan metropolis-satelit, tetapi kedua negara mempunyai hubungan yang saling berhadap-hadapan.

Theotonio Dos Santos, dalam bukunya berjudul *The Structure of Dependence* (1970), mendefinisikan ketergantungan sebagai suatu kondisi atau keadaan yang mengkondisikan perekonomian sekelompok negara oleh pembangunan dan ekspansi dari sekelompok negara yang lain. Hubungan antara dua atau lebih ekonomi dan sistem perdagangan dunia menjadi hubungan ketergantungan jika beberapa negara dapat berkembang melalui *self-impulsion*, sementara negara-negara lain yang berada dalam posisi tergantung hanya dapat berkembang sebagai suatu refleksi dari negara dominan, yang dapat membawa dampak atau pengaruh positif dan negatif terhadap pembangunan yang dilakukan selanjutnya.

⁵⁴ Andre Gunder Frank, *op.cit.*, dalam buku Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 82.

Lebih lanjut, Dos Santos mengatakan bahwa proses ketergantungan tidak hanya merupakan hal yang dipengaruhi oleh faktor eksternal semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor internal. Menurutnya, faktor internal di negara-negara Dunia Ketiga sedikit banyak ikut berperan atau turut serta dalam mengukuhkan maupun memperkuat pola ketergantungan tersebut.⁵⁵ Teori Dos Santos ini kiranya kurang sesuai untuk digunakan dalam memahami pola hubungan Cina-AS secara khusus dengan pertimbangan bahwa kondisi perekonomian Cina tidak dikondisikan serta bukan merupakan hasil dari ekspansi AS dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, perekonomian Cina dan AS tidak saling mendominasi antara satu terhadap yang lainnya.

Samir Amin, dalam bukunya berjudul *Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism* (1976), membedakan negara-negara maju di pusat (*core*) dengan kelompok negara-negara miskin di daerah pinggiran (*periphery*). Menurutnya, dominasi perekonomian dunia oleh negara-negara maju di pusat, berikut rekayasa eksploitasi yang mereka lakukan, telah menjadikan negara *periphery* semakin tergantung pada negara maju di pusat (*complimentary opposites*). Amin mengkombinasikan sistem kapitalis dunia, artikulasi moda produksi, dan internasionalisasi kapital dengan teori pertukaran yang tidakimbang.

Sebagai hasil dari ramuan ketiga unsur tersebut adalah sebuah teori mengenai pembangunan, yaitu *core* dan *periphery* saling berposisi di dalam sebuah formasi sosial-kapitalis dunia. Hubungan antara *core* dan *periphery* ini meningkatkan pembangunan kapitalis di daerah inti dan memblokir pembangunan di daerah *periphery*.⁵⁶ Teori yang disampaikan oleh Amin tersebut kurang tepat kiranya untuk digunakan dalam memahami hubungan antara Cina dan AS dengan pertimbangan bahwa hubungan perekonomian kedua negara tidak dalam kondisi saling mendominasi dan mengeksploitasi, melainkan dalam kondisi hubungan yang saling ketergantungan dalam kesetaraan.

⁵⁵ Theotonio Dos Santos, "The Structure of Dependence", dalam *American Economic Review*, 49 (May), 1970, h. 231-236, seperti dikutip dalam buku Deliarnov, *op.cit.*, h. 86.

⁵⁶ Samir Amin, "Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism", New York: Monthly Review Press, 1976, seperti dikutip dalam buku Deliarnov, *op.cit.*, h. 85-86.

Immanuel Wallerstein, dalam tulisannya yang berjudul *The Capitalist World-Economy* (1979), memberikan banyak tekanan pada perekonomian dunia dan cenderung mengabaikan politik internasional. Ia mempercayai kondisi perekonomian dunia sebagai pembangunan tidak seimbang yang telah menghasilkan hierarki dari wilayah *core*, *semi-periphery*, dan *periphery* (*world system theory*). Yang kaya dari wilayah *core* (Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang) digerakkan atas penderitaan wilayah *periphery* (Dunia Ketiga).⁵⁷ Teori Wallerstein ini kiranya kurang sesuai untuk digunakan dalam memahami hubungan Cina-AS secara khusus. Pertimbangannya bahwa perekonomian Cina saat ini tidak dapat dikatakan dalam kondisi hierakis terhadap perekonomian AS, realitanya justru sebaliknya yakni pertumbuhan ekonomi Cina mengungguli AS dan neraca perdagangan Cina surplus terhadap AS.

Robert W. Cox, dalam tulisannya berjudul *Global Restructuring: Making Sense of the Changing International Political Economy* (1994), mengatakan bahwa saat ini kita berada dalam proses perubahan jauh dari tatanan dunia pasca 1945 yang dipimpin AS. Transformasi mendasar berlangsung dalam tiga bidang utama. *Pertama*, terdapat globalisasi ekonomi yang hierarkis, meliputi kekuatan ekonomi pada wilayah *core*, *semi-periphery*, dan *periphery*. *Kedua*, muncul aktor-aktor non-negara sebagai kekuatan ekonomi politik *non-territorial*, seperti perusahaan multinasional, dan semakin otonomnya kekuatan-kekuatan pasar. *Ketiga*, berkembangnya paham demokrasi yang mengendalikan perekonomian bagi tujuan kesejahteraan.⁵⁸ Pendapat Cox tentang transformasi tatanan dunia tersebut kurang sesuai untuk digunakan dalam memahami hubungan Cina-AS secara khusus. Pertimbangannya bahwa meskipun hubungan ekonomi dan perdagangan Cina-AS pada era global saat ini sudah saling terbuka, akan tetapi paham demokrasi yang dikembangkan AS ke seluruh dunia hingga saat ini tidak mampu mengubah sistem totaliter yang berlaku di Cina.

⁵⁷ Immanuel Wallerstein, "The Capitalist World-Economy: Essays", Cambridge: Cambridge University Press, 1979, dalam buku Robert Jackson and Georg Sorensen, *op.cit.*, h. 241-242.

⁵⁸ Robert W. Cox, "Global Restructuring: Making Sense of the Changing International Political Economy", dalam K. Stubbs and G.R.D. Underhill (eds.), *Political Economy and the Changing Global Order*, London: MacMillan, h. 45-60, seperti dikutip dalam Robert Jackson and Georg Sorensen. *op.cit.*, h. 242.

Pendekatan aliran neomarxisme dalam menganalisis ekonomi politik global dapat lebih dipahami melalui beberapa pokok pikiran sebagai berikut. *Pertama*, pendekatan neomarxisme tidak menggunakan negara atau lembaga internasional sebagai satuan analisisnya tetapi memusatkan pada kelas-kelas. Adapun aktor-aktor lain dalam politik global, seperti negara, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional, hanya merepresentasikan kepentingan suatu kelas tertentu dalam masyarakat. Karena adanya kepentingan kelas yang saling bertentangan, maka politik global pada dasarnya mengandung bibit-bibit konflik yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka melalui revolusi sosial. *Kedua*, politik dunia tidak berlangsung dalam ruangan yang kosong, tetapi dalam konteks perkembangan kapitalisme global, yang sifatnya eksploitatif dan menciptakan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. *Ketiga*, dalam rangka mempertahankan kepentingan dominasi ekonominya, negara-negara kaya yang mewakili kepentingan kelas kapitalis akan menggunakan lembaga-lembaga pembangunan dan keuangan internasional untuk menekan negara-negara berkembang agar memfasilitasi operasi kapital global di negara-negaranya masing-masing. *Keempat*, karena pentingnya ekonomi sebagai determinan yang menentukan interaksi aktor-aktor dalam politik global, maka negara diklasifikasi menurut pembagian kerja internasional, yakni terdapat negara-negara *core*, *semi-periphery*, dan *periphery*.

Dalam memandang globalisasi, pendekatan neomarxisme tidak melihat adanya pergeseran kualitatif dari politik dunia, tetapi justru memperkuat polarisasi ekonomi antara *core*, *semi-periphery*, dan *periphery*.⁵⁹ Untuk dapat lebih memahami teori ekonomi politik aliran marxisme dapat diperhatikan pendapat Robert Gilpin dalam bukunya *The Political Economy of International Relations* (1987) yang mengemukakan antara lain bahwa imperialisme sebagai reformis dikaitkan dengan sejarah perkembangannya, seperti misalnya imperialisme Inggris di India, selain merusak dan menghancurkan tataran masyarakat lama juga menumbuhkan dan meletakkan dasar materiil bagi masyarakat baru yang berorientasi ke Barat.

⁵⁹ Steve Smith and John Baylis, "The Globalization of World Politics: An Introduction to World Politics", Oxford: Oxford University Press, 2001, h. 5-7, dalam buku Aleksius Jemadu. *op.cit.*, h. 52-53.

Berbeda dengan neomarxisme yang berorientasi pada *dependency theory* dan mencela imperialisme dan kapitalisme, marxisme klasik menganggap bahwa perluasan sistem pasar global walaupun dengan cara kekerasan adalah merupakan langkah ke depan bagi umat manusia. Misi historis dari borjuis dan imperialisme adalah untuk menghancurkan sistem produksi feodalis yang menghambat modernisasi pada negara-negara Dunia Ketiga (*less developed countries*).⁶⁰

Sementara itu, dalam upaya membangun teori ekonomi politik internasional, Gilpin mengkombinasikan tiga perspektif teori sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, yakni perspektif realis merkantilisme, perspektif liberalisme, dan perspektif marxisme, dengan penekanan utamanya pada pemikiran merkantilisme. Pandangan tersebut kemudian dikombinasikan dengan pemikiran ekonomi liberal tentang pasar yang otonom yang memungkinkan bagi interdependensi dan pertukaran ekonomi yang saling menguntungkan bagi kelompok yang terlibat. Pemikiran marxisme juga ditekankan, yakni tentang terjadinya pembangunan yang tidak seimbang pada negara maju dan negara berkembang.

Menurut Gilpin, perekonomian dunia harus dipahami dalam sifatnya yang hierarkis pada wilayah *core* yang kaya (Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang) serta wilayah pinggiran yang miskin pada Dunia Ketiga. Menurut Gilpin, pada dasarnya, merkantilis juga sesuai untuk mempelajari kerangka politik yang menentukan aktivitas ekonomi. Premis dasarnya yakni negara dan kekuatan politik militernya lebih penting dalam ekonomi politik internasional daripada kekuatan lainnya, termasuk kekuatan ekonomi. Perspektif kaum merkantilis tentang perekonomian internasional yang liberal hanya dapat berfungsi ketika didukung oleh kekuatan politik yang memimpin, disebut hegemon. Dengan kata lain, kaum merkantilis hirau dengan perlunya negara yang kuat untuk menciptakan perekonomian internasional liberal yang berfungsi baik. Hal tersebut dipicu oleh pemikiran kaum marxisme yang hirau dengan pembangunan dan keterbelakangan di Dunia Ketiga.⁶¹

⁶⁰ Robert Gilpin, "The Political Economy of International Relations", Princeton: Princeton University Press, 1987, dalam Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional*, Jatinangor: Unpad, 2002, hal 83.

⁶¹ Robert Jackson and Georg Sorensen, *op.cit.*, h. 242-246.

Sebagai kesimpulan, menurut kaum marxisme, perekonomian menjadi tempat eksploitasi akibat adanya perbedaan dan pertentangan kelas sosial antara kelas borjuis melawan kelas proletar. Politik, sebagian besar ditentukan oleh konteks sosial ekonomi. Kelas ekonomi yang dominan juga dominan secara politik. Dalam perekonomian kapitalis, kaum borjuis akan menjadi kelas berkuasa. Pembangunan kapitalis global bersifat tidak seimbang bahkan menghasilkan krisis dan kontradiksi, baik antara kelas sosial maupun antar negara-negara maju dengan negara-negara Dunia Ketiga. Sistem ekonomi politik marxisme hirau pada sejarah tentang perluasan kapitalis global yang memicu perjuangan antar kelas dan antara negara dan mendorong terjadinya kebangkitan di seluruh dunia melalui transformasi yang revolusioner.

Dalam memahami hubungan Cina-AS, teori marxisme maupun neomarxisme kiranya kurang sesuai untuk digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, kecuali dalam masalah Taiwan, saat ini antara Cina-AS pada umumnya tidak terjadi pertentangan, baik pertentangan kelas maupun pertentangan negara. *Kedua*, perluasan kapitalisme global yang dikembangkan AS tidak menimbulkan eksploitasi maupun ketimpangan perekonomian antara Cina dan AS, justru pertumbuhan ekonomi Cina saat ini mengungguli AS. *Ketiga*, meskipun Cina secara politis menganut tatanan sosialis, perekonomian Cina saat ini cenderung meninggalkan sistem ekonomi marxis dan bergerak menuju sistem kapitalisme dengan kontrol terpusat atau sering disebut sebagai sosialisme pasar. *Keempat*, meskipun Cina-AS berbeda dalam sistem politik, saat ini antara kedua negara cenderung dapat bekerja sama baik secara politik, ekonomi dan dalam batas-batas tertentu bekerja sama dalam bidang keamanan.

1.5 Hipotesis

Mengacu pada latar belakang dan aplikasi teori liberalisme seperti dikemukakan sebelumnya, maka dapat disampaikan suatu konsep pemikiran bahwa kemajuan ekonomi Cina akan berakibat pada meningkatnya kepentingan ekonomi dan perdagangan Cina dengan AS dan sebaliknya. Kondisi demikian lebih lanjut akan berimplikasi pada peningkatan hubungan kerjasama kedua negara, baik dalam bidang ekonomi maupun politik saat ini maupun di masa mendatang.

Atas dasar konsep pemikiran tersebut dan dikaitkan dengan perspektif teori liberal institusionalis, maka hipotesis yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah “Jika ekonomi Cina mengalami kemajuan, maka hal tersebut akan berimplikasi pada meningkatnya kepentingan ekonomi dan perdagangan secara timbal-balik antara Cina dan AS sehingga terjadi hubungan kerjasama dan saling ketergantungan antara kedua negara pada institusi-institusi internasional, baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan, pasca masuknya Cina menjadi anggota WTO pada tahun 2001”. Dengan status Cina sebagai anggota WTO dan hubungan negara tersebut dengan negara anggota WTO lainnya, khususnya AS, maka Cina telah berhasil memecahkan masalah *normal trading relations* dengan AS, yang berarti menyingkirkan hambatan yang sudah lama terjadi dalam hubungan antara kedua negara, sehingga dapat meningkatkan kepentingan dan hubungan kerjasama timbal-balik antara kedua negara pada bidang ekonomi dan politik.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Sejalan dengan perspektif teori liberalisme, operasionalisasi konsep yang terkandung dalam hipotesis tersebut di atas akan dilakukan dengan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang dan dinamika perkembangan hubungan Cina-AS dalam bab-bab lebih lanjut yang pada dasarnya mengandung penjelasan tentang implikasi kemajuan ekonomi Cina terhadap hubungan timbal-balik negara tersebut dengan AS sebagai berikut. *Pertama*, bahwa kemajuan ekonomi Cina akan berimplikasi pada peningkatan kepentingan ekonomi dan perdagangan timbal-balik antara Cina-AS. *Kedua*, bahwa peningkatan kepentingan ekonomi dan perdagangan Cina-AS akan berimplikasi lebih lanjut pada peningkatan hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik antara kedua negara. *Ketiga*, bahwa peningkatan hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik antara Cina dan AS pada gilirannya akan berimplikasi pada terwujudnya perdamaian yang lebih stabil antara kedua negara dan mampu berkontribusi pada terwujudnya perdamaian dunia yang lebih langgeng. Substansi atas hal-hal tersebut di atas selanjutnya akan disampaikan secara lebih terperinci dalam bab-bab pada penulisan ini.

1.7 Metode Penelitian

Untuk dapat memperoleh data dan informasi atas konsep pemikiran yang terkandung dalam hipotesis tersebut di atas, maka lebih lanjut dilakukan penelitian dengan metode yang relevan dengan topik tulisan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan bahan-bahan lainnya seperti artikel koran, majalah, jurnal, dan internet, yang memiliki kaitan erat dengan tema penelitian, dengan disertai upaya analitis terhadap bahan-bahan referensi yang digunakan. Penulis juga memakai kerangka teori dengan harapan dan asumsi bahwa teori tersebut sesuai dengan permasalahan dan dapat menggambarkan bagaimana peran masing-masing negara, yakni Cina dan AS dalam hubungannya satu sama lain. Setelah itu, penulis akan mencoba melakukan serangkaian analisa atas data yang diperoleh dengan maksud agar diperoleh kesesuaian data dengan permasalahan yang akan dilakukan pembahasan. Data yang digunakan adalah data yang relevan dengan permasalahan dan yang bersifat aktual. Studi dalam penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian akan dilakukan dengan cara deskriptif dan interpretatif. Data dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah berupa teks, termasuk kutipan atau deskripsi terhadap peristiwa tertentu, sedangkan data dalam bentuk angka hanya bersifat melengkapi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan memakai dokumen tertulis, seperti pernyataan dan informasi dalam media massa, buku, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Secara deskriptif, penulis akan mencoba memaparkan gambaran umum mengenai implikasi kemajuan ekonomi Cina pada hubungan Cina-AS pada pelaksanaan hubungannya dengan AS pasca masuknya Cina menjadi anggota WTO pada tahun 2001. Kemudian, penulis akan mencoba memberikan pemahaman secara kronologis mengenai peran Cina dan AS dalam hubungannya satu sama lain melalui institusi-institusi internasional dengan masuknya Cina menjadi anggota WTO.

1.8 Sistematika Penulisan

Atas dasar konsep pemikiran yang terkandung dalam hipotesis dan data serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, maka sistematika penulisan ini dapat disampaikan dalam 5 bab secara berurutan sebagai berikut.

Bab 1 merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum mengenai hal akan yang dibahas, dengan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan saran penelitian, kerangka teori yang terdiri dari teori-teori dalam perspektif hubungan internasional, hipotesis, operasionalisasi konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 merupakan bab yang berisi tentang pengutamaan kerjasama dalam pelaksanaan hubungan Cina-AS, yakni secara bilateral dan melalui institusi-institusi internasional, baik melalui institusi global, institusi multilateral, maupun institusi regional. Bab 3 berisi tentang interdependensi yang terjadi dalam pelaksanaan hubungan antara Cina-AS dalam perekonomian global, antara lain dalam sektor perdagangan, sektor finansial, sektor investasi, sektor politik, maupun dalam pelaksanaan hubungan kerjasamanya dalam institusi internasional, serta pengaruh kemajuan ekonomi Cina terhadap pelaksanaan hubungan antara Cina dengan AS. Bab 4 berisi tentang pelaksanaan kerjasama antara Cina dengan AS dalam penanggulangan krisis finansial tahun 2008 dengan menggambarkan dampak dari krisis finansial dimaksud bagi perekonomian Cina dan hubungannya dengan AS dan kebijakan yang diambil oleh Cina dalam mengatasi krisis finansial dimaksud. Bab 5 merupakan bab kesimpulan dari hal yang telah dibahas oleh penulis beserta implikasi teoretis dan implikasi praktisnya.